

**PERAN *STAKEHOLDER* PADA PERHITUNGAN PDRB SUB-SEKTOR  
KEHUTANAN DI PROVINSI  
JAWA TIMUR**

***THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN THE CALCULATION OF GRDP IN THE  
FORESTRY SUB-SECTOR IN  
EAST JAVA PROVINCE***

**Asihing Kustanti, Rizka Amalia, Tanjung Prameswari, Faridha Hanim**

Program studi Sosiologi Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya

email : [kustanti@ub.ac.id](mailto:kustanti@ub.ac.id)

***Abstract***

*Forests contribute as important capital in national development with various strategic functions in the ecological, economic, and socio-cultural fields. In East Java Province, forest area management not only aims to preserve the environment, but also to improve the welfare of the community around the forest through the sustainable use of forest products. This management involves various stakeholders, including the Forestry Service (DISHUT), Perum Perhutani, and other related agencies. Synergy between stakeholders is needed to optimize the contribution of the forestry sub-sector to regional development, especially in supporting the preparation of the Gross Regional Domestic Product (GDP) which reflects the real economic value of forest products. Therefore, mapping the roles between stakeholders is important in creating effective and sustainable forestry governance in East Java. This study aims to analyze the role of stakeholders in the calculation of the GDP of the forestry sub-sector in East Java Province. This research uses a mixed method. The data sources for this study came from 4 informants and 61 respondents. The analysis was carried out quantitatively-descriptively and qualitatively through interactive models and role analysis. The results show that each stakeholder has a diverse role in the calculation of the GDP of the forestry sub-sector. The Forestry Service and BAPPEDA are the main actors (Key Players), while Perum Perhutani and BPS play the role of strategic supporters (Subjects). Inter-stakeholder collaboration is key to strengthening the real contribution of the forestry sector to regional economic development and sustainable forest management.*

*Keywords: Role, Stakeholders, GDP*

**Abstrak**

Hutan berkontribusi sebagai modal penting dalam pembangunan nasional dengan berbagai fungsi strategis di bidang ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Di Provinsi Jawa Timur, pengelolaan kawasan hutan tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan. Pengelolaan ini melibatkan berbagai stakeholder, di antaranya Dinas Kehutanan (DISHUT), Perum Perhutani, dan instansi terkait lainnya. Sinergi antar stakeholder sangat diperlukan untuk

mengoptimalkan kontribusi sub-sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan nilai ekonomi hasil hutan secara riil. Oleh karena itu, pemetaan peran antar stakeholder menjadi penting dalam menciptakan tata kelola kehutanan yang efektif dan berkelanjutan di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder dalam perhitungan PDRB sub-sektor kehutanan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (*mix method*). Sumber data penelitian ini berasal dari informan sebanyak 4 orang dan responden sebanyak 61 orang. Analisis dilakukan secara kuantitatif-deskriptif dan kualitatif melalui model interaktif dan analisis peran. Hasil menunjukkan bahwa masing-masing *stakeholder* memiliki peran yang beragam dalam perhitungan PDRB Sub-sektor kehutanan. Dinas Kehutanan dan BAPPEDA menjadi aktor utama (*Key Players*), sedangkan Perum Perhutani dan BPS berperan sebagai pendukung strategis (*Subjects*). Kolaborasi antar-stakeholder menjadi kunci untuk memperkuat kontribusi riil sektor kehutanan terhadap pembangunan ekonomi daerah dan pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan.

Kata kunci : Peran, *Stakeholder*, PDRB

## PENDAHULUAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan kinerja ekonomi suatu wilayah. Secara konseptual, PDRB mencerminkan nilai tambah bruto dari seluruh aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam satu wilayah administratif dalam periode tertentu, dan menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah (BPS, 2021).

Salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting dalam struktur PDRB, khususnya di daerah dengan dominasi kawasan hutan seperti Provinsi Jawa Timur, adalah sektor kehutanan. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap nilai tambah ekonomi tetapi juga berperan dalam pelestarian ekosistem, penghidupan masyarakat lokal, serta konservasi sosial-budaya masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada hutan

(Nofra & Pratama, 2024; dan Rumaday et al., 2025).

Sub-sektor kehutanan menyumbang nilai ekonomi melalui hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan jasa lingkungan. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pencatatan aktivitas-aktivitas tersebut dalam sistem statistik resmi yang digunakan untuk menyusun PDRB. Banyak kegiatan kehutanan, terutama yang bersifat informal atau skala kecil, tidak tercatat dengan baik, sehingga dapat berimplikasi pada bias dalam pengambilan kebijakan pembangunan (Nasution et al., 2023; dan Sariwati, 2024).

Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan data primer, tetapi juga karena belum optimalnya koordinasi antar-lembaga dalam proses penyusunan data sektoral. Stakeholder seperti BAPPEDA, Dinas Kehutanan, BPS, Perhutani, serta masyarakat lokal memiliki potensi besar

untuk memperkaya dan memverifikasi data kegiatan kehutanan. Namun, hingga saat ini belum terdapat kerangka kerja yang secara sistematis dan kolaboratif mengintegrasikan peran mereka dalam penyusunan statistik sektoral kehutanan yang digunakan dalam perhitungan PDRB.

Dalam konteks ini, teori stakeholder (Freeman, 1983 dalam Tamrin & Rifti, 2023) memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menjelaskan pentingnya peran dan kontribusi setiap aktor, dimana setiap kelompok atau individu dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau dipengaruhi oleh kinerja organisasi itu sendiri. Pendekatan ini menempatkan berbagai pihak terkait sebagai subjek aktif dalam pengelolaan data dan perumusan kebijakan, bukan hanya sebagai objek penerima kebijakan. Maka dari itu, penting dilakukan pemetaan dan analisis peran para stakeholder untuk mengetahui siapa saja yang terlibat, dan sejauh mana kontribusinya dalam perhitungan PDRB sub-sektor kehutanan di tingkat daerah.

Kajian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek konservasi dan pengelolaan kehutanan berbasis masyarakat atau pada evaluasi kebijakan pembangunan hijau secara makro (Chandra, 2025; Hole & Mayarni, 2025; Purwatiningsih, 2022; Rahman & Jalaludin, 2022). Belum banyak kajian yang secara eksplisit mengevaluasi mekanisme penyusunan PDRB sub-sektor kehutanan dengan pendekatan teoritik berbasis stakeholder, dan dalam konteks lokal Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

memetakan peran *stakeholder* pada pengelolaan sub-sektor kehutanan dan dalam proses penyusunan data PDRB di Provinsi Jawa Timur.

## METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan di beberapa instansi seperti Dinas Kehutanan, perhutani, BAPPEDA, dan BPS Jatim untuk pengambilan data sekunder. Sedangkan pengambilan data primer dilakukan di *main hall* Departemen Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Lokasi penelitian tersebut dipilih untuk menyelenggarakan FGD (*Focus Group Discussion*) guna mengetahui bagaimana peran masing-masing *stakeholder* pada perhitungan PDRB Sub-sektor Kehutanan di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (*mix method*). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memetakan peran *stakeholder* pada pengelolaan Sub-sektor kehutanan. Pendekatan kualitatif untuk memperoleh data peran *stakeholder* terhadap perhitungan PDRB Sub-sektor kehutanan di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini melibatkan informan dari instansi yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 4 informan dari BPS, BAPPEDA, DISHUT, dan PERHUTANI. Sedangkan responden pada penelitian ini sebanyak 61 orang yaitu mahasiswa semester 4 dan 6 Program Studi Kehutanan Universitas Brawijaya yang ditentukan melalui rumus slovin dengan tingkat kepercayaan 10%. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi dokumen.

Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif untuk menguraikan hasil wawancara terstruktur. Sedangkan data kualitatif dianalisis melalui model

interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana untuk menganalisis peran *stakeholder* terhadap perhitungan PDRB Sub-sektor kehutanan di Provinsi Jawa Timur.

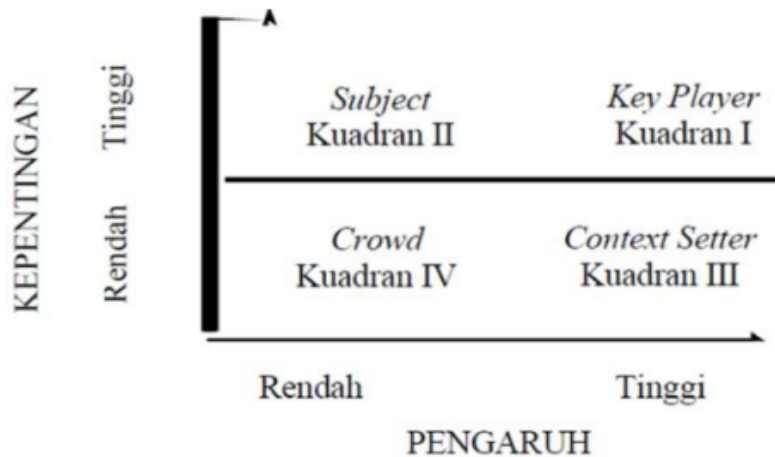
Tabel 1. Ukuran pengaruh dan kepentingan *Stakeholder*

No	Skor	Kriteria	Keterangan
<b>Tingkat Pengaruh <i>Stakeholder</i></b>			
1	0-4	Rendah	Tidak mempengaruhi penentuan PDRB sub-sektor kehutanan
2	5-8	Kurang	Kurang mempengaruhi penentuan PDRB sub-sektor kehutanan
3	9-12	Cukup	Cukup mempengaruhi penentuan PDRB sub-sektor kehutanan
4	13-16	Tinggi	Mempengaruhi penentuan PDRB sub-sektor kehutanan
5	17-20	Sangat Tinggi	Sangat mempengaruhi penentuan PDRB sub-sektor kehutanan
<b>Tingkat Kepentingan <i>Stakeholder</i></b>			
1	0-10	Rendah	Tidak adanya dukungan penentuan PDRB sub-sektor kehutanan
2	11-20	Kurang	Kurang adanya dukungan penentuan PDRB sub-sektor kehutanan
3	21-30	Cukup	Cukup adanya dukungan penentuan PDRB sub-sektor kehutanan
4	31-40	Tinggi	adanya dukungan penentuan PDRB sub-sektor kehutanan
5	41-50	Sangat Tinggi	Sangat mendukung penentuan PDRB sub-sektor kehutanan

**Sumber:** data diolah penulis, 2025

Pada hasil penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan *Stakeholder*, dilakukan pemetaan *Stakeholder*, seperti pada gambar

berikut (Reed et al., 2009 dalam Tamrin & Rifti, 2023).



Gambar 1. Matrik Tingkat pengaruh dan kepentingan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Masing-masing *Stakeholder* Pada Sub-Sektor Kehutanan

Sub-sektor kehutanan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya di wilayah yang memiliki potensi sumber daya hutan yang besar seperti Provinsi Jawa Timur. Kontribusi sektor ini tidak hanya terbatas pada penyediaan hasil hutan kayu dan non-kayu, tetapi juga mencakup fungsi ekologis dan sosial, seperti perlindungan keanekaragaman hayati, penyediaan jasa lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sub-sektor kehutanan menuntut sinergi antara berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja ekonomi daerah, salah satu indikator utama yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB sub-sektor kehutanan mencerminkan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Proses perhitungan PDRB memerlukan data yang valid, konsisten, dan

terintegrasi yang bersumber dari berbagai instansi terkait.

Peran masing-masing instansi dalam sub-sektor kehutanan serta kontribusinya dalam penentuan PDRB dapat dilihat pada tabel 2. Tabel ini merangkum peran Perum Perhutani, BAPPEDA, Dinas Kehutanan (DISHUT), dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dan saling melengkapi dalam sistem pengelolaan dan pengukuran ekonomi kehutanan

#### 1. Perum Perhutani Provinsi Jawa Timur

Sebagai pengelola hutan negara di Jawa dan Madura, Perum Perhutani memiliki peran kunci dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan hutan, termasuk jalan hutan, persemaian, serta infrastruktur pendukung kegiatan produksi dan konservasi. Perusahaan ini juga berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat desa hutan melalui program kemitraan dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Anggiani & Hikmawan (2022) bahwa pola kemitraan

dan pengembangan oleh Perhutani di implementasikan melalui sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang merupakan sistem pengelolaan hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara perum perhutani dengan masyarakat desa hutan maupun pihak yang berkepentingan lainnya yang berupaya mencapai keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan yang optimal. Dalam konteks perhitungan PDRB, Perhutani menjadi sumber utama data produksi kehutanan, termasuk volume dan nilai kayu serta hasil hutan non-kayu. Data ini digunakan untuk mencatat hasil produksi dan menetapkan nilai tambah sektor kehutanan. Kontribusi data dari Perhutani sangat berpengaruh terhadap akurasi penyusunan statistik kehutanan daerah karena cakupan operasionalnya yang luas dan akses langsung ke aktivitas produksi.

## 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur

Salah satu *stakeholder* kunci yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengelolaan kehutanan di Provinsi Jawa Timur adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

BAPPEDA memiliki peran strategis dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan kawasan hutan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra). Fungsi ini mencakup integrasi isu kehutanan ke dalam arah kebijakan pembangunan lintas sektor di daerah, sehingga keberlanjutan sumber daya hutan tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang lebih luas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Humaira et al., (2025) bahwa peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi sentral, terutama ketika pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis harus diorkestrasi secara selaras agar tidak terjebak pada “ritual” penyusunan dokumen belaka, tetapi benar-benar menjelma sebagai peta jalan pembangunan. Dalam konteks penentuan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), BAPPEDA bertanggung jawab menyediakan kerangka makro perencanaan sektor kehutanan serta menetapkan target kontribusi sektor tersebut terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 2. Peran Stakeholders Pada Sub-Sektor Kehutanan

No	Instansi	Peran Pada Sub-sektor Kehutanan	Peran pada Penentuan PDRB
1	PERUM PERHUTANI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan hutan</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan</li> <li>- Penyediaan data serta informasi kegiatan kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencatatan hasil produksi kehutanan</li> <li>- Menyediakan data volume dan nilai produksi kayu dan non-kayu</li> <li>- Menjadi sumber data utama kegiatan ekonomi kehutanan di wilayah kerjanya</li> </ul>

2	<b>BAPPEDA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun perencanaan dan pengembangan kawasan hutan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra)</li> <li>- Mengintegrasikan isu kehutanan dalam kebijakan pembangunan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan kerangka perencanaan pembangunan sektor kehutanan</li> <li>- Menentukan arah kebijakan dan target kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB</li> </ul>
3	<b>DISHUT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai regulator kebijakan kehutanan tingkat daerah</li> <li>- Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kehutanan</li> <li>- Evaluator terhadap kinerja pengelolaan hutan oleh Perhutani dan pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun laporan tahunan kehutanan</li> <li>- Menyediakan data dan informasi kehutanan kepada BPS</li> <li>- Menjadi penghubung antara pelaksana teknis kehutanan dan instansi terkait</li> </ul>
4	<b>BPS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan data statistik sub-sektor kehutanan</li> <li>- Melakukan validasi dan pengolahan data ekonomi sektor kehutanan</li> <li>- Menyajikan data dalam bentuk statistik sektoral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghitung kontribusi sub-sektor kehutanan dalam PDRB berdasarkan pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan</li> <li>- Mempublikasikan hasil PDRB sektoral dan regional</li> </ul>

### 3. Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Jawa Timur

Dinas Kehutanan bertindak sebagai regulator utama kebijakan kehutanan di tingkat daerah (Taufik et al., 2024). Peran strategisnya meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kehutanan, evaluasi terhadap kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan pihak-pihak lain, serta penyusunan laporan tahunan kehutanan yang menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan sektoral. Hal ini sejalan dengan penelitian Hutaeruk & Trimurni (2025) dimana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memiliki fungsi dalam pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas perhutanan sosial dan kemitraan, rehabilitasi hutan dan lahan serta

pengelolaan daerah aliran sungai. Dalam konteks penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), DISHUT berfungsi sebagai penghubung antara pelaksana teknis kehutanan (seperti Perhutani) dengan instansi statistik (Badan Pusat Statistik/BPS), dengan tanggung jawab utama dalam menjembatani dan mengkonsolidasikan data serta informasi kehutanan untuk kepentingan statistik dan pelaporan resmi daerah.

### 4. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur

BPS memegang peranan vital dalam penyusunan PDRB melalui pengumpulan, validasi, dan pengolahan data ekonomi sektor kehutanan. BPS menghitung kontribusi sub-sektor kehutanan terhadap PDRB berdasarkan pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan, serta

mempublikasikan hasilnya dalam bentuk statistik sektoral dan regional. Dalam proses ini, BPS sangat bergantung pada data yang dikirimkan oleh instansi teknis seperti Perhutani dan DISHUT. Validitas dan keterpaduan data sangat menentukan akurasi nilai tambah yang dihitung. Hal ini sejalan dengan Amannullah et al., (2023) bahwa BPS selaku pembina data terus mendorong upaya penguatan penyediaan data melalui kegiatan pembinaan statistik sektoral untuk mengawal kualitas data statistik sektoral dalam kerangka satu data Indonesia (SDI). Pembinaan dilakukan untuk memastikan data statistik sektoral memenuhi kaidah standar data, metadata, kode referensi atau data induk, dan juga interoperabilitas data.

### Hasil Pemetaan *Stakeholder* Pada Pengelolaan Hutan Provinsi Jawa Timur

Hasil perhitungan tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan kehutanan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya variasi tingkat pengaruh dan kepentingan antar aktor. Hal ini mencerminkan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki posisi strategis yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan kehutanan di wilayah tersebut. Aktor dengan pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi, memiliki peran dominan dalam menetapkan arah kebijakan dan pengelolaan sumber daya hutan. Penilaian ini penting untuk memetakan strategi kolaborasi, memperkuat partisipasi, serta menyusun pendekatan pengelolaan hutan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Adapun penilaian tingkat kepentingan *stakeholder* sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Tingkat Kepentingan *Stakeholder*

No.	Aspek	Indikator	1	2	3	4
<b>TINGKAT KEPENTINGAN</b>						
1.	Pengelolaan entitas PDRB sub-sektor kehutanan	Hubungan dengan fasilitator	4	4	5	4
		Kerjasama dengan berbagai <i>stakeholder</i>	4	5	5	3
		Ditetapkan aturan main/regulasi	4	5	4	4
		Aturan main sebagai fungsi pendidikan	4	4	4,5	3
2.	Aturan main/regulasi dalam pengelolaan hutan	Sebagai bentuk informasi dan wawasan dalam menjaga kelestarian hutan	4	4	5	3
		Sebagai akses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	4	4	4,5	2
		Sebagai sumber informasi untuk pelaksanaan riset dan pembelajaran	4	5	4,5	5
3.	Kontribusi entitas PDRB sub-sektor kehutanan	Perekonomian masyarakat sekitar hutan	4	4	5	2
		Menciptakan kelestarian lingkungan dan keanekaragaman biodiversitas	4	5	5	3
4.	Kontribusi ekosistem hutan	Menciptakan kelestarian dan ketepatan pemenuhan entitas PDRB	4	4	4,5	5



<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>34</b>
<b>TINGKAT KEPENTINGAN</b>	<b>T</b>	<b>ST</b>	<b>ST</b>	<b>T</b>

**Ket:** 1) Perhutani, 2) BAPPEDA, 3) Dinas Kehutanan, 4) BPS

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan terhadap berbagai aspek PDRB sub-sektor kehutanan di Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa Bappeda dan Dishut Jatim memiliki tingkat kepentingan yang masuk dalam kategori “sangat tinggi” dengan perolehan skor secara berturut-turut yaitu 44 dan 47, yang mencerminkan peran sentral keduanya dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan sektor

kehutanan. Sementara itu, Perum Perhutani dan BPS memiliki tingkat kepentingan yang masuk dalam kategori “tinggi” dengan perolehan skor secara berturut-turut yaitu 40 dan 34, menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki peran penting dalam pelaksanaan di lapangan dan penyediaan data statistik, pengaruhnya dalam pengambilan keputusan strategis masih berada di bawah Bappeda dan Dishut.

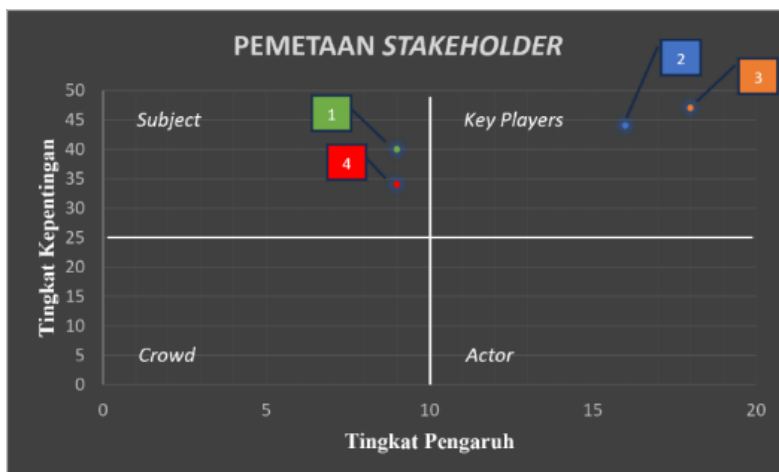
Tabel 4. Hasil Tingkat Pengaruh *Stakeholder*

No.	Aspek	Indikator	1	2	3	4
<b>TINGKAT PENGARUH</b>						
1.	Pengelolaan entitas PDRB sub-sektor kehutanan	Kinerja instansi	2	4	4,5	2
		Penerapan <i>reward and punishment</i>	2	4	4,5	2
2.	Aturan main/regulasi dalam pengelolaan hutan	Kepatuhan dalam penerapan aturan main	3	4	4	2
		Kualitas pemimpin dalam konsistensi penerapan aturan main	2	4	5	3
<b>TOTAL</b>			<b>9</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>9</b>
<b>TINGKAT PENGARUH</b>			<b>C</b>	<b>T</b>	<b>ST</b>	<b>C</b>

**Ket:** 1) Perhutani, 2) BAPPEDA, 3) Dinas Kehutanan, 4) BPS

Berdasarkan hasil penilaian tingkat pengaruh terhadap berbagai aspek PDRB sub-sektor kehutanan di Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa Perhutani dan BPS Jatim memiliki tingkat pengaruh yang masuk dalam kategori “cukup” dengan perolehan skor yang sama yaitu 9. Kemudian untuk Bappeda Jatim memiliki tingkat pengaruh yang masuk dalam

kategori “tinggi” dengan perolehan skor yaitu 16 dan perolehan skor tingkat pengaruh tertinggi Dishut Jatim yaitu 18 yang masuk kedalam kategori “sangat tinggi”. Adapun Matriks tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing *stakeholder* dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.** Matriks Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder  
**Ket:** 1) perhutani, 2) BAPPEDA, 3) Dinas Kehutanan, 4) BPS

Berdasarkan hasil pemetaan *stakeholder* diketahui bahwa 2 *stakeholder* masuk kedalam kuadran I yaitu *Key Players* dan 2 *stakeholder* masuk kedalam kuadran II yaitu *Subject* dengan penjelasan sebagai berikut.

### 1. Key Players

Key Players adalah pemangku kepentingan yang memiliki nilai tingkatan kepentingan dan tingkatan pengaruh yang sama-sama besar atau tinggi (Iswanto, 2024). *Stakeholder* dalam kuadran ini memiliki kemampuan langsung untuk memengaruhi hasil proyek melalui keputusan, sumber daya, atau dukungan strategis. *Stakeholder* sangat peduli terhadap hasil proyek karena dampaknya signifikan terhadap kebutuhan atau tujuan mereka. *Stakeholder* yang terlibat dalam kuadran keyplayers ini adalah Dinas kehutanan (DISHUT) dan BAPPEDA. DISHUT berperan sebagai lembaga yang memiliki otoritas utama dalam pengelolaan kehutanan, serta bertanggung jawab atas kebijakan, regulasi, dan implementasi program di sektor kehutanan. DISHUT memiliki pengaruh yang tinggi dalam mengontrol pengelolaan sumber daya hutan

dan keberlanjutan serta memiliki kepentingan yang tinggi untuk memastikan kontribusi sub-sektor kehutanan terhadap PDRB tetap optimal dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Selain DISHUT, BAPPEDA juga menjadi *Stakeholder* yang terlibat dalam keyplayers. BAPPEDA berperan sebagai perencana pembangunan daerah, salah satunya memastikan sektor kehutanan berjalan selaras dengan prioritas pembangunan provinsi. BAPPEDA memiliki pengaruh yang tinggi untuk menentukan arah kebijakan strategis dan anggaran untuk pengelolaan kehutanan. BAPPEDA juga memiliki kepentingan yang tinggi untuk memastikan sektor kehutanan mendukung ekonomi lokal dan regional.

### 2. Subject

Subject adalah pemangku kepentingan yang memiliki tingkatan kepentingan yang nilainya tinggi akan tetapi memiliki nilai rendah pada tingkatan pengaruhnya (Tamrin & Rifti, 2023). *Stakeholder* dalam kuadran ini tidak memiliki otoritas atau kemampuan langsung untuk mengubah hasil proyek secara signifikan. Meski pengaruhnya

terbatas, *Stakeholder* pada kuadran ini sangat peduli terhadap hasil proyek karena berdampak pada kebutuhan atau kepentingan mereka. *Stakeholder* yang terlibat dalam kuadran subject yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perhutani. BPS berperan sebagai penyedia data resmi yang mendukung pengelolaan sektor kehutanan melalui penyediaan data PDRB yang akurat. BPS memiliki pengaruh yang rendah karena tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan kehutanan. Namun, BPS memiliki kepentingan yang tinggi yaitu untuk menghasilkan data PDRB yang akurat dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain BPS, PERHUTANI juga menjadi salah satu *Stakeholder* yang masuk kedalam kuadran Subject dimana perhutani merupakan perusahaan negara yang berperan mengelola kawasan hutan dan hasilnya, yang berkontribusi langsung pada PDRB sub-sektor kehutanan. Perhutani memiliki pengaruh rendah karena Perhutani lebih fokus pada pengelolaan operasional dan komersial, dengan sedikit keterlibatan dalam kebijakan strategis pada level provinsi. Namun memiliki kepentingan yang tinggi dalam keberhasilan pengelolaan sektor kehutanan secara langsung karena memengaruhi bisnis mereka.

### KESIMPULAN

Penghitungan PDRB sub-sektor kehutanan di Jawa Timur melibatkan berbagai stakeholder dengan peran strategis dan tingkat pengaruh serta kepentingan yang bervariasi. Perum Perhutani, BAPPEDA, Dinas Kehutanan (DISHUT), dan BPS berkontribusi sesuai fungsinya masing-masing dalam pengelolaan, perencanaan, pengawasan teknis, dan penyediaan data statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa

DISHUT dan BAPPEDA tergolong sebagai *key players* karena memiliki pengaruh dan kepentingan yang sangat tinggi, sedangkan BPS dan Perum Perhutani tergolong sebagai *subject* dengan kepentingan tinggi namun pengaruh relatif lebih rendah. Pemetaan ini penting untuk menentukan strategi kolaborasi yang lebih efektif dalam pengembangan sektor kehutanan dan penyusunan PDRB yang akurat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amannullah, G., Sanjoyo, Kurniawan, R., Budiantoro, S., & Nugraheni, I. (2023). Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development GOALS (TPB/SDGs) Tahun 2023. Kedeputan Bidang Kemaritiman Dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Anggiani, P., & Hikmawan, M. D. (2022). Dinamika Kemitraan antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Pulo Cangkir Kabupaten Tangerang. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(2), 112–127.
- BPS. (2021). BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURAKARTA.
- Chandra, F. (2025). Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 104–119.
- Hole, A. D., & Mayarni, M. (2025). Pengelolaan Hutan Adat Ghimbo

- Pomuan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kampar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2134–2145.
- Humaira, B. J., Sari, D. R., Kusnadi, E. S., Hafiyandini, M., Zamzani, P. A., & Sankana, T. J. (2025). Negara Kesejahteraan Dan Ekonomi Kerakyatan: Analisis Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Sumbawa 2025–2029. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(4), 71–80.
- Hutauruk, N. W., & Trimurni, F. (2025). Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengawasan Hutan Mangrove Sicanang di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan. *SAJJANA: Public Administration Review*, 3(01), 101–109.
- Iswanto, D. (2024). Analisis Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Pulau Derawan. *Semesta*, 4(1), 25–33.
- Nasution, B. C., Lubis, Y., & Akhyar, A. (2023). Analisis Yuridis Perambahan Hutan pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Polres Padang Lawas). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 335–350.
- Nofra, D., & Pratama, F. S. (2024). Eksistensi Taman Nasional Bukit Dua Belas dalam Pelestarian dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup Suku Anak Dalam. *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama Dan Humaniora*, 28(2), 116–134.
- Purwatiningsih, S. D. (2022). Pemahaman masyarakat sekitar hutan pada informasi konservasi hutan dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 110–120.
- Rahman, F., & Jalaludin, M. (2022). Pengelolaan sumber daya hutan berbasis kearifan lokal pada masyarakat Bali. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 51–60.
- Rumaday, S. M., Sangadji, I. M., & Isan, M. (2025). Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Sebagai Upaya Konservasi dan Peningkatan Ekonomi di Papua Barat Daya. *Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Sebagai Upaya Konservasi Dan Peningkatan Ekonomi Di Papua Barat Daya*, 1–6.
- Sariwati, P. (2024). Studi Pemanfaatan Tanaman Akar Tabar Kedayan (*Aristolochia Foveolata* Merr) Bagi Masyarakat Suku Dayak Di Desa Paking Dan Potensi Implementasinya Pada Pembelajaran Biologi.
- Tamrin, M. H., & Rifti, L. (2023). Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Bumdes “Sumber Rejeki” Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(2), 167–177.
- Taufik, M., Asriani, A., & Ramayana, W. S. (2024). Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari Pengembangan Objek Wisata Kebun Raya Kendari. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(1), 88–103.